

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena yang terjadi yaitu terdapat Pedagang Kaki Lima di wilayah Jalan Tampomas Kabupaten Sumedang. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah satu dari sejumlah upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menata para Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan berdagangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang.

Didalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George Charles Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri sedangkan sumber penelitiannya adalah aparatur pemerintah dan masyarakat pedagang kaki lima di Jalan Tampomas Kabupaten Sumedang. Perolehan data yang didapat oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan cukup baik meskipun pada tahap berkelanjutannya belum optimal secara keseluruhan dalam hal pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan dilihat dari empat dimensi dalam implementasi kebijakan. *Pertama*, komunikasi sudah berjalan cukup baik. *Kedua*, Sumber daya cukup baik. *Ketiga*, disposisi cukup baik. *Keempat*, struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan telah efektif karena telah mempunyai SOP dan prosedur fragmentasi yang jelas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.

ABSTRACT

This research is motivated by a phenomenon that occurs that there are street vendors in the area of Tampomas Street Sumedang Regency. With the Sumedang Regency Regulation on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors is one of a number of strategic efforts of the Sumedang District Government to organize the Street Vendors in conducting their trading activities. The purpose of this study was to determine the Implementation of Structuring and Empowering Street Vendors Policy in Sumedang Regency.

In this study refers to the theory of public policy implementation according to George Charles Edward III that the success of policy implementation is influenced by four dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is descriptive qualitative research method. The research instrument was his own research while the source of the research was the government apparatus and the street vendor community in Tampomas Street Sumedang Regency. Obtaining data obtained by researchers is through observation, interviews, documentation and study of literature and using data analysis techniques Miles and Huberman.

The results showed that the Implementation of the Policy on Structuring and Empowering Street Vendors in Sumedang District had run quite well even though the sustainability stage was not optimal overall in terms of public understanding of the policy, this was due to the four dimensions of policy implementation. First, the communication has gone quite well. Second, the resources are quite good. Third, the disposition is quite good. Fourth, the bureaucratic structure in the Implementation of Structuring and Empowerment Policy for Street Vendors in Sumedang Regency can be said to have been effective because it already has clear SOP and fragmentation procedures.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Keywords: *Policy Implementation, Structuring and Empowering Street Vendors, Government and Community Apparatus.*